

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS: PENGARUH JARAK RUMAH KE SEKOLAH DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA TERHADAP PARTISIPASI SEKOLAH DI PROVINSI PAPUA)¹

Ridho Ilahi

Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung

Email: ridho_statc@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan yang berkualitas merupakan dambaan semua pihak. Kualitas pendidikan sebagaimana kita harapkan sangat ditentukan oleh tingkat pembiayaan yang dilakukan. Guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan pembiayaan secara optimal. Standar pembiayaan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan. Sumber pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pemerintah (pusat dan daerah), orang tua peserta didik, dan kelompok-kelompok masyarakat. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua usia 7-15 tahun menempati peringkat terendah yakni sebesar 78,34%. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengkajian karakteristik partisipasi sekolah usia 7-15 tahun di Provinsi Papua berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Perumahan (MSBP) tahun 2012. Penelitian ini akan dibatasi pada faktor sosial ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun di Provinsi Papua tahun 2012, antara lain pengeluaran per kapita rumah tangga dan jarak rumah ke sekolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan regresi diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,756. Hal ini berarti 75,6% variasi Partisipasi Sekolah dapat dijelaskan oleh variabel Jarak Rumah ke Sekolah dan Pengeluaran RT per Bulan, sedangkan sisanya sebesar 24,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penulisan ini. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa semakin jauh jarak rumah ke sekolah maka semakin rendah angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun, dan semakin tinggi pengeluaran rumah tangga per bulan maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun.

Kata kunci: pembiayaan, partisipasi, jarak, pengeluaran, regresi

Abstract

Quality education is the desire of people. Quality of education is largely determined by the level of funding. To produce high quality education is needed funding optimally. Funding standards include minimum requirements on the unit cost of education, procedures and management, allocation, and accountability costs of education. Funding sources can be classified into three main categories: government (central and local), parents, and community groups. Rate of school participation aged 7-15 years in Papua's Province is the lowest rank value 78.34%. Framework of this study is limited to the study of Rate of school participation aged 7-15 years in Papua's Province based on data National Socio-Economic Survey Socio-Cultural and Housing Module in 2012. This study is limited to socio-economic factors that affect Rate of school participation aged 7-15 years in the province of Papua in 2012, such as household expenditure per capita and the distance between home and school by using multiple linear regression analysis. The Result of regression is known that the coefficient of determination (*adjusted R²*) value 0.756. This means that 75.6% variation in school participation can be explained by the distance between home and school and household expenditure per capita per month, while the remaining 24.4% is explained by other variables that are not presented in this paper. Results of the regression coefficients showed that the farther the distance between home and school, the lower rate of school participation aged 7-15 years, and the higher the household expenditure per month, the higher rate of school participation aged 7-15 years.

Keywords: funding, participation, distance, expenditure, regression

¹ Paper ini telah dipresentasikan dalam acara Simposium Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa dengan tema "Pendidikan Berkeadilan" (Universitas Indonesia, 30 Oktober 2013)

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Menurut data hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2012, penduduk Indonesia berusia tujuh sampai lima belas tahun yang masih sekolah sebanyak 42.581.266 orang, sekitar 763.605 orang diantaranya putus sekolah (1,79%) dan terdapat sebanyak 799.234 orang yang tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (1,88%) dan yang masih sekolah sebesar 40.623.767 (95,40%). Diantara provinsi lain di Indonesia, Provinsi Papua menempati peringkat terendah yakni sebesar 78,34%. Angka ini cukup memprihatinkan mengingat kebijakan wajib belajar sembilan tahun sudah diberlakukan sejak tahun 1994 silam.

Penuntasan wajib belajar 9 tahun merupakan upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah anak kelompok 7-12 tahun sebesar 99,9% dan partisipasi sekolah anak kelompok 13-15 tahun sebesar 96% pada tahun 2014. Kegiatan penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat didefinisikan sebagai upaya meminimalkan anak tidak pernah sekolah dan tidak sekolah lagi hingga sama atau lebih kecil dari 5% dari jumlah seluruh anak usia 7-15 tahun. Penuntasan wajib belajar 9 tahun akan lebih mudah dilakukan jika kondisi/karakteristik anak partisipasi sekolah usia 7-

15 tahun sudah teridentifikasi karena dengan pemahaman tentang kondisi tersebut, akan memudahkan perumusan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan nyata di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pengelompokan partisipasi sekolah usia 7-15 tahun menurut karakteristik dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

I. Rumusan Masalah

Banyak anak dalam kategori usia sekolah tetapi karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah dan masih banyak pula anak bersekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Suendra (1999) penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat seorang anak untuk memperoleh atau menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Hambatan sosial budaya
- b) Hambatan sosial ekonomi
- c) Hambatan geografis
- d) Hambatan kurangnya fasilitas pendidikan
- e) Hambatan tenaga kependidikan

Berdasarkan teori diatas dan dengan pertimbangan ketersediaan data, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada faktor sosial ekonomi rumah tangga yang mempengaruhi partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun di Provinsi Papua tahun 2012, antara lain pengeluaran per kapita rumah tangga dan jarak rumah ke sekolah.

II. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan standar pembiayaan pendidikan di Indonesia.
- 2) Untuk mendeskripsikan sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia.
- 3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tahun 2013.

Tinjauan Pustaka

Manusia dalam proses pendidikan adalah inti utama. Realitas sejarah membuktikan bahwa pendidikan dalam kultur masyarakat manapun berkepentingan mengarahkan manusia kepada tujuan-tujuan tertentu. Selaras dengan itu, Nurcholis Madjid (dalam Sidi, 2001;xi) menyatakan bahwa pembicaraan seputar pendidikan melibatkan banyak hal yang harus direnungkan. Sebab, pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan demi memperoleh kesinambungan, pertahanan, dan peningkatan hidup. Jadi, manusia dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya pendidikan diciptakan oleh manusia untuk membentuk manusia itu sendiri.

Proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia pada dasarnya tidak hanya fokus pada pembentukan karakter seorang individu, melainkan hakikatnya adalah membangun masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Maka

proses pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan lingkungan kehidupan yang dimiliki individu yang terlibat di dalamnya baik itu peserta didik, pendidik, dan semua orang yang terlibat dalam pendidikan. Prof. Nana S. (2003:163) menyatakan bahwa keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri peserta didik, baik faktor fisik maupun sosial-psikologis yang berada pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berkaitan dengan lingkungan sekolah, terdapat dua aspek yaitu aspek lingkungan fisik seperti sarana prasarana, dan aspek lingkungan sosial yang menyangkut hubungan sosial dan emosional antarseluruh elemen yang ada dalam lingkungan sekolah. Sekolah yang kaya dengan aktivitas belajar, memiliki sarana prasarana yang memadai, dikelola dengan baik, diliputi oleh suasana pembelajaran yang wajar, akan sangat mendorong semangat belajar para peserta didik.

Oleh karena itu, para ahli pendidikan bersepakat bahwa lingkungan individu yang terlibat dalam proses pendidikan menjadi salah satu sumber belajar dalam pendidikan. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan individu belajar secara formal yang dikenal dengan lingkungan sekolah, dan lingkungan individu tumbuh berkembang serta mengaplikasikan hasil belajarnya yang dikenal dengan lingkungan masyarakat. Keduanya memiliki peranan yang sangat besar dalam proses pendidikan, baik untuk individu, untuk sekolah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan antara individu, sekolah, dan lingkungan sekitarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Faktor utama dalam pendidikan anak adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak, keluarga merupakan institusi penting dalam proses pendidikan anak (Martin Luther dalam Hasif 2006).

Keadaan keluarga mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan anak. Keluarga yang tingkat ekonominya lebih tinggi dapat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak secara lebih baik dibandingkan keluarga yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah (Faturochman dalam Hasif, 2006). Menurut Indriyanto dalam Hasif (2006), orang tua dengan tingkat pendidikan lebih tinggi mempunyai kemampuan untuk mengarahkan anaknya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Hal senada juga dikemukakan oleh Bridge *et al* (1979) dalam Boediono dan Ghazali (1999), bahwa pendidikan kepala rumah tangga mempunyai pengaruh positif tidak langsung terhadap kualitas pendidikan keluarganya.

Menurut Rahardjo dalam Ridha (2005), status finansial rumah tangga dapat mempengaruhi status sekolah anggota rumah tangga. Semakin baik finansial rumah tangga diharapkan anggota rumah tangganya dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan tertentu. Status finansial rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pengeluaran rumah tangga. Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting, khususnya karena

peranan kunci pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik memiliki pendapatan yang lebih baik dan mempunyai peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin, dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, akan memberi peluang lebih besar bagi anaknya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Metodologi Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan referensi waktu tahun 2012. Data Susenas Tahun 2012 terdiri dari dua jenis yaitu Kor dan Modul Sosial Budaya Perumahan (MSBP). Dalam penelitian ini mengambil referensi tempat studi kasus di Provinsi Papua.

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua, dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*).
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.
- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/ militer, penjara, dsb) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutakhirkan pada setiap menjelang pelaksanaan survei.

Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih nh wilcah dari Nh secara *pps* (*Probability Proportional to Size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga SP2010 (M_i). Kemudian wilcah tersebut dialokasikan secara acak ke dalam empat triwulan.
- Tahap kedua, memilih satu BS pada setiap wilcah terpilih Triwulan I, II, III, dan IV secara *pps* dengan *size* jumlah rumah tangga SP2010-RBL1.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih untuk Susenas dipilih sejumlah rumah tangga biasa ($m=10$) secara sistematis berdasarkan hasil pemutakhiran

listing rumah tangga SP2010-C1 dengan menggunakan Daftar VSEN12-P. Daftar nama kepala rumah tangga disusun dari Ekstrak SP2010-C1 untuk variabel nama KRT, alamat, dan tingkat pendidikan KRT, kemudian dilakukan pemutakhiran lapangan.

- Jumlah rumah tangga yang dijadikan sampel dalam Susenas 2012 di Provinsi Papua sebesar 2.573 rumah tangga yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini dari 27 Kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dijadikan sampel dalam model regresi linear berganda sebanyak 24 kabupaten/kota.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dalam analisis regresi linear berganda berusaha menjelaskan variabel respon atau tak bebas menggunakan lebih dari satu variabel tak bebas. Dalam analisis regresi linier multiple dikenal adanya model populasi, model sampel dan model taksiran. Model sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Y : Partisipasi Sekolah 7-15 tahun sebagai variabel tak bebas

x_1 : Jarak Rumah ke Sekolah (km) sebagai variabel bebas pertama

x_2 : Pengeluaran rumah tangga per Bulan (Rp) sebagai variabel bebas kedua

$\hat{\beta}_0$: Taksiran Koefisien Intersep

$\hat{\beta}_1$: Taksiran Koefisien Regresi x_1

$\hat{\beta}_2$: Taksiran Koefisien Regresi x_2

e : Galat (residual)

Rumus menghitung koefisien regresi sebagai berikut:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{(\sum x_1 y)(\sum x_2^2) - (\sum x_2 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum x_2 y)(\sum x_1^2) - (\sum x_1 y)(\sum x_1 x_2)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}_1 - \hat{\beta}_2 \bar{x}_2$$

Koefisien korelasi pada regresi linier berganda ini merupakan koefisien korelasi parsial yaitu korelasi masing-masing secara terpisah antara y dengan x_1 , y dengan x_2 dan x_1 dengan x_2 .

$$r_{x_1 y} = \frac{\sum x_1 y}{\sqrt{\sum x_1^2 \sum y^2}} \quad r_{x_2 y} = \frac{\sum x_2 y}{\sqrt{\sum x_2^2 \sum y^2}} \quad r_{x_1 x_2} = \frac{\sum x_1 x_2}{\sqrt{\sum x_1^2 \sum x_2^2}}$$

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi $R^2 = r^2$ atau juga dengan rumus berikut:

$$R^2 = \frac{\hat{\beta}_1 \sum x_1 y + \hat{\beta}_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}$$

Untuk dapat melakukan uji hipotesis secara individu maka harus dihitung nilai t-statistik dengan terlebih dahulu menghitung standar deviasi dan Residual Sum Square (RSS) nya.

$$\sum e^2 = \sum \hat{y} - \hat{\beta}_1 \sum x_1 y - \hat{\beta}_2 \sum x_2 y \quad \sigma^2 = \frac{\sum e^2}{n - k}$$

$$t_h(\beta_1) = \frac{\hat{\beta}_1}{Se(\hat{\beta}_1)} \quad t_h(\beta_2) = \frac{\hat{\beta}_2}{Se(\hat{\beta}_2)}$$

$$Se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\sum x_2^2}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2} \sigma^2} \quad Se(\hat{\beta}_2) = \sqrt{\frac{\sum x_1^2}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2} \sigma^2}$$

Pada regresi linier berganda perlu dilakukan uji hipotesis secara bersama-sama yang dinamakan Uji-F, dimana rumus untuk menghitung F-stat adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{(\hat{\beta}_1 \sum x_1 y + \hat{\beta}_2 \sum x_2 y) / (K - 1)}{\sum e^2 / (N - K)}$$

Pembahasan

Kesalahan dalam menetapkan kebijakan pada dunia pendidikan akan mengakibatkan keterpurukan suatu negara dalam menghadapi persaingan. *Trend* permasalahan yang dihadapi di Indonesia dewasa ini berupa dua hal yang sangat bertolak belakang, yaitu berupa otonomi yang lebih kental bernuansa kedaerahan (lokal) dan globalisasi yang lebih kental bernuansa mendunia. Terdapat tiga faktor utama sebagai pendorong globalisasi yaitu berupa teknologi informasi, uang, dan manajemen (Gaffar, 2004). Oleh karena itu, persyaratan yang mutlak untuk dapat memenangkan persaingan global termasuk bidang pendidikan haruslah memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam menguasai informasi, memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan manajemen yang berdaya saing.

Bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu negara dalam mencari dan memanfaatkan informasi akan sangat menentukan sampai di mana informasi mendunia tersebut dapat dikuasai. Tindakan selanjutnya berkaitan dengan informasi yang dikuasai adalah bagaimana mengolah dan mengelola informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat. Kenyataan demikian sangat memerlukan kecerdasan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Faktor lain sebagai

pendorong percepatan globalisasi dalam segala aspek yaitu berupa uang. Pada tahap awal, persoalan uang bukanlah pada berapa besar jumlah uang yang harus dimiliki, tetapi lebih fokus pada bagaimana kecerdasan yang dimiliki berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Jumlah uang yang banyak bukan merupakan jaminan untuk memenangkan persaingan global, tetapi kecerdasan dalam mengelola keuangan akan menjadi faktor utama dalam memenangkan kompetisi global. Kecerdasan keuangan yang dimiliki akan mampu mendatangkan penghasilan luar biasa sehingga mampu memperbaiki perekonomian baik dirinya maupun negara.

Faktor lain sebagai pendorong percepatan globalisasi yaitu kemampuan manajemen yang unggul pada diri individu atau suatu negara. Kecerdasan manajemen akan sangat menentukan bagaimana faktor teknologi informasi dan faktor uang akan memiliki peran penting. Dalam upaya memenangkan persaingan global haruslah memiliki kecerdasan dalam mengelola dan memadukan antara teknologi informasi dan uang. Sisi lain, persoalan otonomi yang tampaknya kontradiktif dengan istilah globalisasi, perlu dicermati bersama oleh kita.

Globalisasi yang berlangsung menuntut persyaratan sangat ketat yang berupa kecerdasan teknologi informasi, kecerdasan keuangan, dan juga kecerdasan manajemen (pengelolaan). Ketiga faktor tersebut merupakan tantangan bagi setiap unit atau setiap satuan yang telah menyatakan otonomi. Kecerdasan teknologi informasi, kecerdasan keuangan, dan juga kecerdasan manajemen merupakan tiga faktor yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh daerah atau satuan pendidikan yang telah menyatakan sebagai wilayah otonom. Semangat yang terkandung dalam istilah otonomi dan globalisasi sangat berbeda dan pada umumnya persyaratan yang diperlukan untuk memenangkan persaingan global merupakan kelemahan yang dimiliki oleh unit-unit otonom.

Untuk wilayah Indonesia, pada umumnya terdiri atas daerah-daerah yang masih tergolong rendah dalam segala aspek, khususnya dalam kecerdasan teknologi informasi, kecerdasan keuangan, dan kecerdasan manajemen. Hal ini merupakan titik lemah bagi setiap unit otonom yang harus menghadapi globalisasi yang telah hampir mengesampingkan jati diri. Disadari atau tidak perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan terjadi secara global. Adanya era pasar bebas merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, hal ini memberikan peluang bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Dalam menghadapi pasar global, kebijakan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik. Kebijakan yang ditetapkan harus mampu memperbaiki manajemen

pendidikan sehingga menjadi lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 11 ayat 2, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak pada **usia tujuh sampai lima belas tahun** seharusnya mendapatkan pendidikan dasar secara **gratis**. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengemban amanat rakyat, dapat bergerak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyulut gejala tersebut. Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan di Indonesia semakin murah atau bahkan gratis tapi bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas. Hal ini memang sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan sekolah unggulan berkualitas yang bebas biaya. Namun hal tersebut baru berupa kebijakan regional di daerah tertentu. Alangkah baiknya jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala nasional.

I.1 Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.

Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: a) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; b) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu, perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan vs

social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Standar pembiayaan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal dengan rincian:

- a) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- b) Biaya operasional meliputi Biaya operasional pendidikan langsung berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.
- c) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

1.2 Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007, sekolah dewasa ini diharuskan untuk menyusun pedoman pengelolaan dana (investasi dan operasional) yang mengacu pada standar pembiayaan. Pedoman ini mengatur:

- a) Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah yang dikelola
- b) Penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.
- c) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
- d) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya.

Pedoman tersebut diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah dan harus disetujui oleh institusi di atasnya. Pedoman ini juga harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Sumber dana sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: pemerintah (pusat dan daerah), orang tua peserta didik, dan kelompok-kelompok masyarakat.

1.3 Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara, antara lain mencakup yang berikut:

- a) Hibah (*grant*) dan dana bantuan biaya operasional kepada sekolah.

- b) Membayar gaji guru.
- c) Membantu sekolah untuk mengadakan proyek penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan, serta ikut mendanai pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah.
- d) Pemerintah juga melakukan kontribusi tidak langsung kepada sekolah. Misalnya, melalui pelatihan kepala sekolah dan guru, menyiapkan silabus dan bahan, serta melakukan pengawasan.

1.4 Pemerintah Daerah

Di negara Indonesia, urusan pendidikan dasar dan menengah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, akan memiliki peluang lebih besar untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan sekolah.

1.5 Orang Tua Peserta didik

Kontribusi orang tua bisa merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Cara orang tua berkontribusi bisa mencakup yang berikut:

- a) Membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi.
- b) Memberi kontribusi kepada komite sekolah.
- c) Membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu, seperti perumahan bagi guru.
- d) Orang tua bisa menyumbangkan tenaga dan keterampilan tertentu dalam berbagai kegiatan seperti pekerjaan bangunan atau membantu dalam pelatihan olah raga, atau bahkan mungkin dapat menggantikan guru yang tidak hadir.
- e) Membayar guru atas tambahan pelajaran di luar jam sekolah.
- f) Membayar pembelian buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan seragam sekolah, meja dan kursi, perpustakaan, dan dana kegiatan olah raga.
- g) Mendanai kesejahteraan anak-anak mereka, seperti uang transpor, uang makan, dan sebagainya.

Kita perlu berasumsi bahwa semua orang tua dapat memberikan kontribusi yang sama, apakah itu sifatnya finansial atau dalam bentuk-bentuk kontribusi lainnya. Tingkat penghasilan orang tua di daerah perkotaan dan daerah pedesaan tampaknya cukup berbeda, seperti halnya juga ukuran keluarga. Diperlukan pendekatan yang sensitif oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengetahui perbedaan keadaan orang tua peserta didik dan kemudian memberi kelonggaran bagi peserta didik

yang orang tuanya kurang beruntung secara ekonomi. Jika di satu pihak kepala sekolah harus menetapkan target yang cukup ambisius untuk menggalang dana bagi sekolah, di lain pihak kepala sekolah juga perlu menerima keadaan bahwa tidak semua orang dapat berkontribusi dalam kadar yang sama. Untuk melayani keluarga yang kurang mampu, perlu disiapkan dana dukungan beasiswa bagi mereka yang menunjukkan kemampuan akademik.

1.6 Kelompok Masyarakat

Kelompok-kelompok masyarakat seringkali termasuk sebagai sumber penting pendanaan sekolah. Kelompok-kelompok ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari para tokohnya (utamanya informal) di masyarakat, seperti kaum ulama. Di Indonesia, banyak sekolah (swasta) yang dibangun dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Identifikasi dalam memobilisasi dana bisa mencakup:

- Memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat dalam proyek pengembangan sekolah.
- Melibatkan tokoh masyarakat dalam memobilisasi massa untuk berpartisipasi secara efektif dalam proyek-proyek sekolah.
- Mengumpulkan dana untuk sekolah-sekolah di suatu wilayah.
- Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan mantan peserta didik dalam proyek swakarsa penggalangan dana.
- Memungut pajak khusus pendidikan dari warga masyarakat.

Di dalam masyarakat bisa ada orang-orang yang juga memutuskan untuk membantu satu atau beberapa sekolah dengan dana dalam jumlah cukup besar. Sebagai contoh terdapat pengusaha yang ingin mendermakan sesuatu bagi satu atau lebih sekolah. Kontribusi seperti ini hendaknya disambut dengan baik dan bahkan sebaiknya didorong. Namun, Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap yayasan yang menyelenggarakan sekolah semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial. Dewasa ini kecenderungan seperti itu semakin banyak. Fungsi sosial pendidikan telah mulai memudar berganti dengan penekanan pada fungsi keuntungan ekonominya, khusus bagi para pengelolanya

1.7 Peserta didik

Para peserta didik bisa merupakan sumber penggalangan dana sekolah yang baik, jika mereka tahu manfaatnya bagi diri mereka sendiri dan bagi sekolah. Ada beberapa cara pelibatan peserta didik seperti:

- Pengumpulan dana melalui kegiatan seperti pertanian, memelihara ayam petelur, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain.
- Kegiatan pengumpulan dana; misalnya melalui konser musik, tari, olahraga, pameran, bazar, atau turnamen.

1.8 Yayasan

Ada sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau lembaga lain yang bukan berdasarkan ideologi tertentu yang merupakan organisasi non pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan spesifik dalam mendirikan dan mengoperasikan sekolahnya yang juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan beradab. Yayasan ini memberikan dukungan finansial kepada sekolah dalam berbagai bentuk, seperti bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Yayasan ini bisa menyimpan dana di bank, yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham, reksadana dan obligasi. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyediakan dana pengoperasian sekolah.

II. Analisis Regresi Linear Berganda

II.1 Uji Asumsi Regresi Linear Berganda

a) Uji Kenormalan

Hypothesis Test Summary

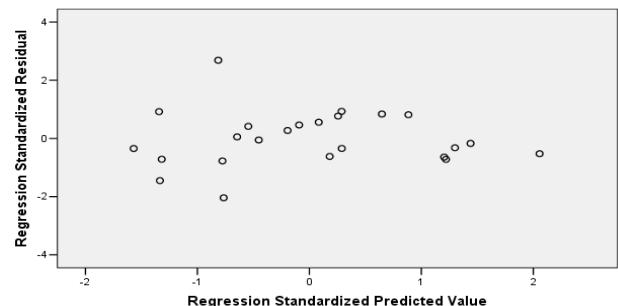
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Standardized Residual is normal with mean -0,00 and standard deviation 0,96.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	,842	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05.

Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov tampak bahwa *Standardized Residual* menunjukkan angka SIG. sebesar 0,842, nilai ini di atas $\alpha=0,05$ maka asumsi residual berdistribusi normal terpenuhi.

b) Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: APS



Deteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada gambar, di mana sumbu X adalah $\hat{Y}$ yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual ($\hat{Y} - Y$) yang telah dibakukan. Bila titiknya menyebar secara tidak berpola (acak) serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas, tapi bila titiknya membentuk pola maka telah terjadi heteroskedastisitas. Dari *scatter plot* terlihat bahwa tidak ada pola tertentu pada gambar, sehingga pada model tersebut disimpulkan **asumsi homoskedastisitas** terpenuhi.

c) Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.869 ^a	.756	.733	4.29836	2.301

a. Predictors: (Constant), EXCAP, JARAK

b. Dependent Variable: APS

Berdasarkan tabel di atas pula dihasilkan statistik d Durbin Watson sebesar 2,301. Sedangkan dari tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh:

- angka d^L sebesar 1,1878 dan $4 - d^L = 2,122$
- angka d^U sebesar 1,5464 dan $4 - d^U = 2,4536$

Ternyata nilai statistik d Durbin-Watson terletak pada daerah pengujian yang tidak menolak H_0 . Jadi disimpulkan model **tidak mengandung gejala autokorelasi**.

d) Uji Multikolinearitas

Dari tabel berikut tampak untuk kedua variabel bebas tersebut, angka VIF berada di sekitar angka 1. Maka disimpulkan model regresi tersebut **tidak terdapat multikolinieritas**.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	74.223	5.738		12.936	.000		
	JARAK	-5.926	1.453	-.477	-4.077	.001	.848	1.179
	EXCAP	2.61E-005	.000	.564	4.817	.000	.848	1.179

a. Dependent Variable: APS

e) Uji Koefisien Regresi

Dari hasil perhitungan regresi diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R2*) yang diperoleh sebesar 0,756. Hal ini berarti 75,6% variasi Partisipasi Sekolah dapat dijelaskan oleh variabel Jarak Rumah ke Sekolah dan Pengeluaran RT per Bulan, sedangkan sisanya sebesar 24,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penulisan ini.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1201.007	2	600.504	32.502	.000 ^a
	Residual	387.995	21	18.476		
	Total	1589.002	23			

a. Predictors: (Constant), EXCAP, JARAK

b. Dependent Variable: APS

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 32,502. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa uji dari simultan regresi dapat diterima.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	74.223	5.738		12.936	.000		
	JARAK	-5.926	1.453	-.477	-4.077	.001	.848	1.179
	EXCAP	2.61E-005	.000	.564	4.817	.000	.848	1.179

a. Dependent Variable: APS

Pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil Uji t untuk koefisien “JARAK” menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05%, berarti bahwa variabel jarak rumah ke sekolah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah, dan Hasil Uji t untuk koefisien “EXCAP” menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05%, berarti bahwa variabel pengeluaran rumah tangga per bulan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$y = 74,223 - 5,926 x_1 + 2,61E-005 x_2$$

y = Partisipasi Sekolah

x_1 = Jarak Rumah ke Sekolah

x_2 = Pengeluaran rumah tangga per bulan

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Variabel Jarak Rumah ke Sekolah mempunyai arah koefisien yang bertanda negatif terhadap Partisipasi Sekolah sementara Pengeluaran RT per Bulan mempunyai arah koefisien yang positif.
- Koefisien Jarak Rumah ke Sekolah memberikan nilai sebesar 5,926 yang berarti bahwa jika Jarak Rumah ke Sekolah semakin jauh dengan asumsi variabel lain tetap maka Partisipasi Sekolah akan mengalami penurunan.
- Koefisien Pengeluaran rumah tangga per Bulan memberikan nilai sebesar 2,61E-005 yang berarti bahwa jika Pengeluaran rumah tangga per bulan semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka Partisipasi Sekolah akan mengalami peningkatan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pembiayaan pendidikan yang dilakukan secara otonomi perlu mendapat perhatian secara serius dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga semangat otonomi harus selaras dengan semangat untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia.
- Standar pembiayaan pendidikan terbagi menjadi tiga biaya, yaitu:
 - Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

- Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung.
- c. Dana pembiayaan pendidikan bersumber dari: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Orang Tua Peserta didik, Kelompok Masyarakat, dan Yayasan.
- d. Studi kasus di Provinsi Papua menunjukkan bahwa semakin jauh jarak rumah ke sekolah maka semakin rendah angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun, dan semakin tinggi pengeluaran rumah tangga per bulan maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun

Saran

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hendaknya berupaya menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dengan biaya yang murah bahkan gratis dengan mengefisienkan penggunaan APBN dan APBD.
- b. Perlu adanya subsidi silang pembiayaan pendidikan dari masyarakat golongan menengah ke atas sehingga tercipta pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Berdasarkan studi kasus di Provinsi Papua, infrastruktur pendidikan perlu ditingkatkan dengan penambahan jumlah sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan sehingga jarak tempuh ke sekolah semakin dekat. Selain itu, taraf kehidupan masyarakat perlu ditingkatkan dengan penyediaan lapangan kerja sehingga para orang tua tidak lagi memikirkan mau makan apa untuk besok tetapi sudah memikirkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya.

Daftar Pustaka

- Anwar, I. (1991). Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, No. 1 Tahun X, 1991: 28—33.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kumpulan Permendiknas Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Panduan KTSP*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Dewantara, Ki Hadjar. (2004). *Pendidikan*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa.
- Fakih, Mansour, et al. (2000). *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: ReaD Book, Insist.
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Gaffar, M. F. (1991). *Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, Nomor 1 Tahun X, 1991: 56—60.
- Gaffar, Mohammad Fakry. (2004). *Membangun Kembali Pendidikan Nasional dengan Fokus: Pembaharuan Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Globalisasi*. Disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V, di Surabaya, 5—9 Oktober 2004.
- Herabudin. (2009). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sembiring, RK. (2003). *Analisis Regresi*. Edisi Kedua. Bandung: ITB.
- Tilaar, H.A.R. (2001). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Rosda.
- Tirtarahardja, Umar & Sulo, S.L.La. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Keterangan Penulis

Penulis bernama Ridho Ilahi. Penulis kelahiran Sungailiat pada 9 Oktober 1984 ini menamatkan pendidikan di DIV Statistika Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta. Penulis berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini Penulis sedang menempuh Tugas Belajar (TB) sebagai mahasiswa Program Magister Statistika Terapan di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis berhasil meraih peringkat pertama pada lomba Call For Paper yang diadakan oleh Makmal Pendidikan Dompot Dhuafa dengan paper berjudul “Standar Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus : Pengaruh Jarak Rumah ke Sekolah dan Pengeluaran Rumah Tangga Terhadap Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua)”.